



Jaksa Teliti Berkas Dugaan Korupsi Pepadu

Terkait Tender 100 Ekor Sapi Kelompok Tani

NEGARA - Setelah sempat dikembalikan atau P19. Berkas kasus dugaan tindak pidana korupsi pengembangan pertanian terpadu (Pepadu) kembali dilimpahkan

Satreskrim Polres Jembrana ke pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana. Namun, sampai saat jaksa belum menyimpulkan apakah berkas tersebut lengkap (P21) atau perlu diperbaiki lagi.

Hal tersebut disampaikan Kasipidsus Kejari Jembrana I Made Pasek Budiawan, kemarin (8/6). Dijelaskan, berkas setebal kurang lebih 20 centimeter tersebut baru

dilimpahkan oleh penyidik Satreskrim Polres Jembrana dan saat ini masih dalam proses penelitian. "Kami pelajari dulu, belum bisa menyimpulkan sudah lengkap apa belum," terangnya.

Penelitian berkas yang kedua kalinya ini, tidak hanya difokuskan berkas yang sudah diperbaiki. Tim peneliti masih memeriksa fakta-fakta baru dalam berkas.

"Kalau ada fakta baru yang perlu di dalam, maka akan kami serahkan lagi untuk dilengkapi," ujarnya. Berkas yang dilimpahkan kedua kalinya ini dengan tersangka K. Rawi Adnyani, 55, selaku pemenang tender pengadaan sapi untuk sejumlah kelompok tani di Jembrana. Dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka ini, sebagai kontraktor pemenang

tender pengadaan 100 ekor sapi yang ditenderkan pada tahun 2013. Dugaan tindak pidana korupsi itu menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 80 juta.

Tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun

2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut, terkait pengadaan sapi betina untuk pengembangan kawasan pertanian terpadu berbasis organik dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana pada tahun 2013, pelaksana pemenang tender CV. Duta Karya Raya milik tersangka. (bas/gup)

Edisi : Jumat, 9 Juni 2017

Hal : 24



Program Bedah Rumah Bangli Macet

■ BPK Minta Pemkab Tunda Sementara ■ Salah Menempatkan Rekening Belanja

BANGLI, TRIBUN BALI - Program bedah rumah di Bangli terpaksa diundur hingga bulan Agustus 2017 mendatang. Terjadi kesalahan penempatan rekening dalam anggaran APBD induk. Rencananya, program ini direalisasikan bulan lalu.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangli, I Nengah Sukarta mengatakan, sesuai hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), ditemukan adanya kekeliruan pada penempatan rekening belanja. Anggaran bedah rumah yang seharusnya di pasang pada rekening belanja bantuan sosial barang, dipasang pada rekening belanja hibah.

Meski tetap bisa dicairkan, namun BPK memberikan saran agar menunda program bedah rumah hingga pelaksanaan kegiatan di APBD Perubahan bulan Agustus. "Atas saran BPK inilah kami akhirnya menunda program bedah rumah. Nantinya, setelah anggaran yang dipasang di rekening hibah digeser ke rekening belanja bansos," ucap Sukarta saat ditemui *Tribun Bali*, Kamis (8/6).

Mengenai tertundanya program bedah rumah ini, Sukarta mengaku pihaknya banyak menerima keluhan masyarakat, terutama mereka yang menerima penerima program tersebut.

Masyarakat mempertanya-



TRIBUN BALI/FREDEY MERCURY

I NENGAH SUKARTA

kan program pemerintah kabupaten yang terkesan macet. Di sisi lain, program bedah rumah dari Pemrov Bali sudah hampir selesai. "Atas kondisi ini, kami harap bagi masyarakat penerima bantuan bedah rumah agar bersabar dengan permasalahan teknis ini," kata dia.

"Dari hasil verifikasi untuk target tahun ini, sebanyak 100 lebih unit rumah yang perlu dibenahi, semuanya sudah siap. Tinggal menunggu bulan Agustus saja. Mudah-

mudahan bulan Agustus mendatang, programnya sudah bisa jalan," sambungnya.

Sukarta juga menjelaskan, penanganan bedah rumah berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT), Kabupaten Bangli mendapat jatah sebanyak 414 unit. Dari jumlah tersebut, penyelesaiannya dibagi menjadi dua, yaitu Pemrov sebanyak 314 unit, dan Pemkab sebanyak 100 unit.

Hanya saja data tersebut setelah melalui proses verifikasi ulang, hanya 296 unit rumah yang layak dibedah. Untuk Pemkab Bangli sendiri, pihaknya mengambil data masyarakat berpenghasilan rendah diluar dari data BDT, yakni sebanyak 702 unit rumah yang ditarget akan selesai dalam lima tahun.

"Setelah hasil verifikasi ulang, hanya 298 unit rumah yang layak untuk dibedah, dan semuanya diambil oleh pemprov," sambungnya. (mer)

Target 186 Unit

SELAIN 78 unit dari dana APBD, tahun ini Pemkab Bangli menarget 51 unit rumah warga miskin lainnya melalui dana ADD, sebanyak 27 rumah dengan dana CSR, dan sekitar 30 unit rumah yang akan dibedah oleh Kementerian PUPR melalui Dinas PUPR Kabupaten Bangli.

"Untuk target Pemerintah

Kabupaten Bangli yang menggunakan dana APBD sebesar Rp 30 juta per unit, akan membedah rumah warga miskin sebanyak 76 unit, itu tersebar di empat kecamatan yakni Bangli sebanyak 12 unit, Susut sebanyak lima unit, Kintamani sebanyak 24 unit, dan Temuku sebanyak 35 unit," sebutnya. (mer)

Edisi : Jum'at, 9 Juni 2017

Hal : 17